

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Depok masih menunjukkan kecenderungan stagnan meskipun secara jumlah absolut mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas pemilih tidak diiringi dengan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, peran KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya sebatas pada aspek teknis, tetapi juga sebagai agen edukasi politik yang mampu membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas.

Dalam dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, kendala yang dihadapi KPU Kota Depok terletak pada masih terbatasnya ruang pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan program sosialisasi. Program yang dirancang cenderung bersifat top-down, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan yang heterogen. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan program oleh masyarakat. Pada dimensi partisipasi dalam pelaksanaan, KPU Kota Depok telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi pemilih dengan beragam metode, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Namun demikian, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan efektivitas sosialisasi, kejenuhan pemilih akibat intensitas pemilu yang tinggi, serta faktor teknis seperti penggabungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebabkan jarak tempuh pemilih menjadi lebih jauh. Kondisi ini turut mempengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara.

Selanjutnya, pada dimensi partisipasi dalam pemanfaatan manfaat, masih terdapat kendala berupa rendahnya tingkat literasi politik dan kesadaran sebagian

masyarakat terhadap pentingnya Pilkada. Meskipun berbagai program sosialisasi telah dilakukan, manfaat yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi politik belum tumbuh secara substantif. Adapun pada dimensi partisipasi dalam evaluasi, kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi penyelenggaraan Pilkada. Evaluasi yang dilakukan masih didominasi oleh internal lembaga, sehingga masukan dari masyarakat belum terakomodasi secara maksimal. Hal ini menyebabkan perbaikan strategi yang dilakukan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat di lapangan. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi KPU Kota Depok dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, komunikasi politik, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif, inovatif, dan adaptif agar partisipasi masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kota Depok perlu meningkatkan strategi sosialisasi yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan agar program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media digital perlu dioptimalkan secara lebih interaktif, khususnya untuk menjangkau pemilih muda. Kerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas juga perlu diperkuat guna memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Dari sisi teknis, evaluasi terhadap penggabungan TPS penting dilakukan agar tidak menjadi hambatan, serta perlu dibuka ruang evaluasi publik bagi masyarakat. Secara akademis, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di daerah lain serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods agar hasil lebih komprehensif. Selain itu, kajian mengenai perilaku politik generasi muda dan efektivitas komunikasi digital perlu dikembangkan untuk memperkaya penelitian partisipasi politik.